

Leaderless Group Discussion

**UNTUK SKEMA ASESMEN
ADMINISTRATOR**

Permasalahan Dalam Evaluasi Program Publik Berbasis Data

Pada tahun 2024, anda sebagai kepala divisi evaluasi program publikasi di lembaga negara data dan statistik, lembaga sedang menghadapi serangkaian tantangan dalam mengukur efektivitas program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Salah satu program besar yang sedang dievaluasi adalah Program Peningkatan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal, yang telah berjalan selama dua tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelajar yang dapat mengakses pendidikan dasar di wilayah-wilayah terpencil, namun ada banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Pertama, dalam pengumpulan data, banyak sekolah di daerah terpencil yang tidak memiliki sistem administrasi yang baik, sehingga data terkait jumlah siswa, tingkat partisipasi, dan keberhasilan pendidikan sulit untuk diperoleh dengan akurat. Beberapa sekolah bahkan belum memiliki sistem komputerisasi untuk mencatat data siswa, yang memperburuk proses pengumpulan data. Sebagai contoh, di Kabupaten Sumba Timur, hampir 40% sekolah dasar masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku log, yang menyebabkan kesalahan input data dan memperlambat proses pengumpulan data. Di sisi lain, meskipun sebagian besar wilayah sudah memiliki jaringan internet, akses ke internet di wilayah-wilayah terpencil di Papua dan Nusa Tenggara Timur sangat terbatas, yang membuat penggunaan platform digital untuk pengisian kuesioner atau pelaporan data menjadi sangat sulit.

Kedua, meskipun data dari daerah yang lebih mudah diakses terkumpul dengan relatif baik, masalah muncul dalam hal ketidakkonsistenan antara data yang dilaporkan oleh instansi pemerintah daerah dan data yang dikumpulkan oleh petugas lapangan. Beberapa instansi pemerintah daerah terlambat memperbarui data mereka, sehingga data yang diterima tidak akurat. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar baru saja mengupdate data pelajar di wilayah mereka setelah lebih dari enam bulan, meskipun data terbaru diperlukan untuk melakukan analisis yang lebih akurat. Bahkan, beberapa daerah enggan memberikan data yang dianggap sensitif, seperti jumlah pelajar yang belum terdaftar di sekolah atau jumlah drop-out yang tinggi. Data ini sangat penting untuk mengevaluasi apakah program ini berhasil menjangkau seluruh anak usia sekolah, namun banyak pihak yang menganggap data tersebut dapat mencoreng reputasi daerah mereka.

Masalah berikutnya adalah dalam hal transparansi data. Meskipun transparansi dianggap penting, banyak pihak yang merasa takut bahwa data yang dipublikasikan bisa digunakan untuk menyerang kebijakan pemerintah daerah yang belum berhasil atau program yang dianggap gagal. Sebagai contoh, di daerah Yogyakarta, laporan mengenai tingginya angka drop-out di beberapa sekolah tidak dipublikasikan karena takut menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap program pendidikan. Bahkan, beberapa data yang diproses oleh lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia, harus melalui banyak lapisan verifikasi sebelum dipublikasikan, yang sering kali memperlambat proses evaluasi.

Ketiga, ada masalah komunikasi antar instansi. Program ini melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Setiap instansi memiliki kebijakan dan prioritas yang berbeda-beda, yang seringkali menyebabkan kebingungannya dalam mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, Kementerian Pendidikan ingin memastikan bahwa dana untuk program ini digunakan dengan tepat untuk membangun infrastruktur sekolah, sementara Kementerian Keuangan lebih fokus pada efisiensi anggaran. Pada rapat koordinasi terakhir, terjadi ketegangan antara kedua kementerian karena Kementerian Keuangan ingin menurunkan anggaran untuk

infrastruktur dan lebih mengutamakan penggunaan dana untuk pelatihan guru, sementara Kementerian Pendidikan tetap memprioritaskan pembangunan ruang kelas dan fasilitas lainnya. Seringkali terjadi ketidaksepakatan antara dua kementerian ini dalam menentukan prioritas anggaran dan sumber daya untuk pelaksanaan program.

Keempat, evaluasi program juga dihadapkan pada masalah dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis sering kali tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk memastikan keakuratan dan integritas data. Beberapa daerah bahkan tidak memiliki akses internet yang memadai untuk mengirimkan data secara digital, sehingga banyak data yang harus dikumpulkan secara manual dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh, di Kabupaten Poso, hampir 60% dari sekolah-sekolah di sana mengandalkan formulir kertas untuk mengumpulkan data pelajar dan tidak bisa mengakses aplikasi berbasis web yang digunakan oleh pusat untuk input data. Meskipun ada rencana untuk mengintegrasikan teknologi yang lebih maju, implementasinya membutuhkan pelatihan dan pengeluaran anggaran yang lebih besar.

Selain itu, banyak pengumpulan data dilakukan di daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Di daerah pegunungan Jayawijaya, Papua, petugas lapangan harus berjalan kaki hingga lima jam untuk mencapai sekolah yang terisolasi. Akibatnya, waktu pengumpulan data menjadi sangat lama dan mengurangi efisiensi keseluruhan program.

Program ini juga menghadapi masalah dalam mengelola perubahan yang terjadi selama pelaksanaan. Pada awalnya, anggaran yang dialokasikan untuk program ini cukup besar, namun karena berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, anggaran tersebut mengalami pemotongan yang signifikan. Anggaran awal sebesar 500 miliar rupiah untuk program ini dipangkas menjadi hanya 350 miliar rupiah, yang mengharuskan tim untuk mengubah pendekatan dalam pelaksanaan program. Hal ini mempengaruhi hasil yang dapat dicapai dan menghambat upaya untuk menyelesaikan evaluasi dengan waktu yang telah ditentukan.

Seluruh permasalahan ini menuntut tim evaluasi untuk dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi solusi yang tepat. Tim harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang akurat dan relevan untuk menilai keberhasilan program, serta membuat keputusan yang tepat tentang apakah program ini harus dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Oleh karena itu, tim evaluasi perlu berdiskusi dan mencari solusi atas tantangan-tantangan yang ada, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan dalam evaluasi program publik di masa depan.